



PERJANJIAN KERJA (PERKIN) 2024

SATPOL PP PROVINSI BANTEN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AL MUKTABAR**

Jabatan : **Pj. GUBERNUR BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2024

Pihak Kedua,


AL MUKTABAR

Pihak Pertama,


Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19710805 199101 1 001

SATUAN KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DPA TA-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Menurunnya Tingkat Kriminalitas dan Ketertiban Umum (melalui pemenuhan SPM trantibumlinmas)	Rasio Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Persen	100
3	Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran	Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100
SASARAN INTERNAL				
1	Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak di Pemerintah Provinsi Banten	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan RB berdampak sesuai dengan fokus masing-masing Perangkat Daerah	Persen	100
		Persentase Penyerapan Anggaran	Persen	95

PENDAPATAN DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0

BELANJA DAERAH

KODE	URUSAN/PROGRAM	ANGGARAN
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	46.333.243.670
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.958.923.350
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.405.608.400
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.968.711.920
	JUMLAH BELANJA	46.333.243.670


Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA,**



Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19710805 199101 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MASSAPUTRO DELLY,TP,S.Sos.M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. AGUS SUPRIYADI,S.Sos.M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,


Dr. AGUS SUPRIYADI,S.Sos.M.Si
NIP. 197108051991011001

Pihak Pertama,


MASSAPUTRO DELLY TP,S.Sos.M.Si
NIP. 1974060419913021001

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Sasaran Program : Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah) Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100
	Sasaran Kegiatan : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
	Sasaran Kegiatan: Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	39.958.923.350
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.958.923.350
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	153.088,800

1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.683.200
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61.005.600
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.400.000
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.719.711.650
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan Polisi Pamong Praja)	24.324.314.650
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan Polisi Pamong Praja)	360.000.000
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.000.000
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	8.000.000
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.397.000
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Satuan Polisi Pamong Praja)	8.000.000
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan Polisi pamong Praja)	3.800.000
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran(Satuan Polisi Pamong Praja)	3.200.0000
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	910.520.000
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	766.437.000
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	144.083.000
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.189.876.000
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	150.000.000
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800.000.000
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	39.876.000
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	523.098.000
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	523.098.000
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.062.628.900
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.062.628.900
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.400.000.000
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Satuan Polisi Pamong Praja)	1.300.000.000
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Satuan Polisi Pamong Praja)	100.000.000

Serang, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos.M.Si
NIP. 197108051991011001

MASSAPUTRO DELLY TR. S.Sos.M.Si
NIP. 1974060419913021001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PAUNDRA BAYYU AJIE,AP,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. AGUS SUPRIYADI,S.Sos.M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN**

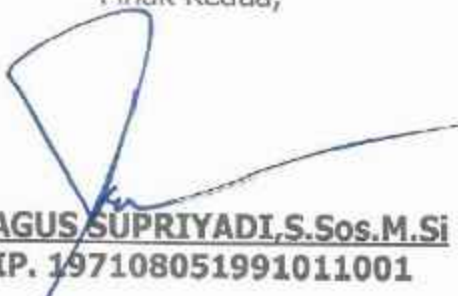
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,


Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos.M.Si
NIP. 197108051991011001

Pihak Pertama,


PAUNDRA BAYYU AJIE, AP.M.Si
NIP. 197609231994121001

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Sasaran Program : Rasio Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Cakupan Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum Daerah Provinsi	Persen	100
	Sasaran Kegiatan : Tertaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rasio Ketercapaian Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persen	100

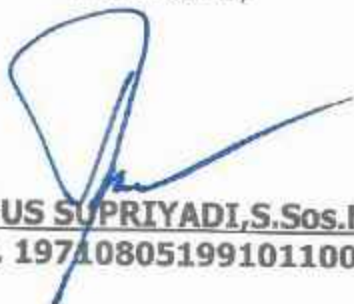
BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.643.454.400
1.05.02.1.0001	Pengangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.643.454.400
1.05.02.1.01.0006	Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	10.000.000
1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat	10.000.000
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	100.000.000
1.05.02.1.01.0011	Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekertariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	10.000.000
1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	10.000.000
1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	182.841.000
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	50.000.000
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.000.000
1.5.2.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	403.613.400
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan	702.000.000

	Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	100.000.000
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.050.000.000

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,



Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos.M.Si
NIP. 197108051991011001

Pihak Pertama,



PAUNDRA BAYYU AJIE, AP.M.Si
NIP. 197609231994121001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP.MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos.M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN**

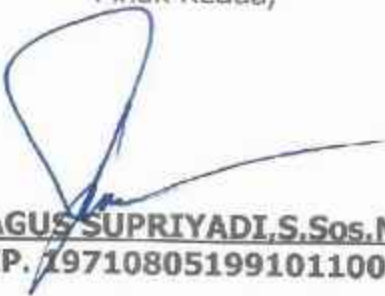
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,


Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos.M.Si
NIP. 197108051991011001

Pihak Pertama,


ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP.MM
NIP. 19770607199121001

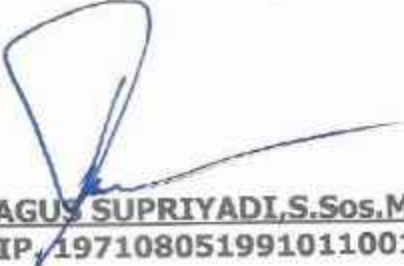
No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Sasaran Program : Rasio Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	Persen	100
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rasio Ketercapaian Penegakan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persen	100

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.036.500.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.036.500.000
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1.036.500.000
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	250.000.000
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	200.000.000
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	286.500.000
1.05.02.1.02.0005	Penyelidikan terhadap Dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000
1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	50.000.000
1.05.02.1.02.0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	40.000.000
1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	100.000.000
1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegka Peraturan Daerah	40.000.000

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,


Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos.M.Si
NIP. 197108051991011001

Pihak Pertama,


ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP.MM
NIP. 19770607199121001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KUSTANTINA,ST.M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PPNS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. AGUS SUPRIYADI,S.Sos.M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

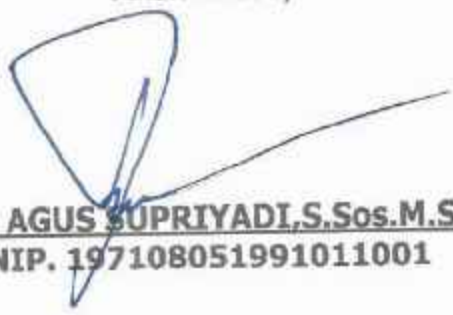
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,


Dr. AGUS SUPRIYADI,S.Sos.M.Si
NIP. 197108051991011001

Pihak Pertama,


KUSTANTINA, ST.M.Si
NIP. 197208311998032006

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Sasaran Program : Rasio Koordinasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Cakupan pengembangan PPNS dan Pemberkasan Hasil Penyelidikan dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Trantibum	Persen	100
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persen	100

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	725.654.000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	725.654.000
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	725.654.000
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Satuan Polisi Pamong Praja)	200.000.000
1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekertariat PPNS	30.000.000
1.05.02.1.03.0004	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	40.000.000
1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekertariat PPNS	370.654.000
1.05.02.1.03.0006	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	85.000.000

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos.M.Si
NIP. 197108051991011001

KUSTANTINA, ST, M.Si
NIP. 197208311998032006





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. LUTFI MUJAHIDIN.M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. AGUS SUPRIYADI,S.Sos. M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. AGUS SUPRIYADI,S.Sos.M.Si
NIP. 197108051991011001

Pihak Pertama,

Drs. LUTFI MUJAHIDIN,M.Si
NIP. 197108061991011001

SATUAN KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DPA TA-2024

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Program dan Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Sasaran Program : Rasio Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Cakupan Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran	Persen	100
	Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persen	100
	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.968.711.920
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.968.711.920
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1.813.214.920
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	80.982.480
1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	2.372.000
1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	3.480.000
1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	47.000.000
1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	14.500.000
1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	51.840.000
1.05.04.1.01.0016	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	9.600.000
1.05.04.1.01.0017	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	90.000.000

1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.372.000
1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	11.246.000
1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	3.480.000
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	791.905.440
1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	210.700.000
1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	100.000.000
1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	28.737.000
1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	365.000.000
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	155.497.000
1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	70.000.000
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	85.497.000

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Dr. AGUS SUPRIYADI, S.Sos. M.Si
NIP. 197108051991011001

Pihak Pertama,



Drs. LUTFI MUJAHIDIN, M.Si
NIP. 197108061991011001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IPAN MOCHAMAD IMRON.A, SH.M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Massaputro Delly Tri Pamungkas, S.Sos.M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MASSAPUTRO DELLY TP.S.Sos.M.Si
NIP. 197406041993021001

IPAN MOCHAMAD IMRON.A, SH.M.Si
NIP.197009212001122004

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target				
1	2	3	4	5				
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Person	100	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	Perangkat Daerah	4
					Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Perangkat Daerah	1
					Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Perangkat Daerah	1
					Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Perangkat Daerah	1
					Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Perangkat Daerah	1
					Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Perangkat Daerah	1
					Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Perangkat Daerah	1
					Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Perangkat Daerah	1
					Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Perangkat Daerah	1
					Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Perangkat Daerah	1
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Person	100	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	87
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
					Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akunansi SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akunansi SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	Dokumen	12
					Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akunansi SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akunansi SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	Dokumen	12
					Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1
					Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1
					Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1
					Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1
					Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1
					Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	6
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administradi Umum Perangkat Daerah	Persen	100
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12
5	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	58
6	Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
	Tersedianya Jasa pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4
7	Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	60
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan Polisi Pamong Praja)	
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan Polisi Pamong Praja)	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Satuan Polisi Pamong Praja)	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan Polisi pamong Praja)	
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran(Satuan Polisi Pamong Praja	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Satuan Polisi Pamong Praja)	
1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Satuan Polisi Pamong Praja)	

Pihak Pertama

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua

MASSAPUTRO DELLY TR.S.Sos.M.Si
NIP. 197406041993021001

IPAN MOCHAMAD IMRON.A.SH.M.Si
NIP.197009212001122004





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DADAN RUKANDAR, SE.MM**

Jabatan : **ANALIS PERENCANA AHLI MUDA PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MASSAPUTRO DELLY TP,S.Sos.M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PPROVINSI
BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


MASSAPUTRO DELLY TP.S.Sos.M.Si
NIP. 197406041993021001


DADAN RUKANDAR,SE.MM
NIP. 196907101999011001

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1
	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil koordinasi penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	12
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Laporan	3
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	87

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12
	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12
	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1
	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18
	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Satuan Polisi Pamong Praja)	
1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Satuan Polisi Pamong Praja)	
1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
1.05.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Satuan Polisi Pamong Praja)	
1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (Satuan Polisi Pamong Praja)	
1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Satuan Polisi pamong Praja)	
1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran(Satuan Polisi Pamong Praja	

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MASSAPUTRO DELLY TP.S.Sos.M.Si
NIP. 197406041993021001

DADAN RUKANDAR,SE.MM
NIP. 196907101999011001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INDAH PUSPARANI,S.STP**

Jabatan : **KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **PAUNDRA BAYYU AJIE,AP.M.SI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

PAUNDRA BAYYU AJIE, AP.M.SI
NIP.197609231994121001

Pihak Pertama,

INDAH PUSPARANI,S.STP
NIP. 198408122002122001

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rasio Ketercapaian Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persen	100
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja sama Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Kejahatan	Dokumen	1
	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang Tersedia	Unit	2
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen	12
	Tersedianya Pelayanan Dasar Kepada Warga Negara yang Terkena Dampak Penegakan Perda Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga yang Berdampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	12
	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Laporan	12
	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penganganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketentaraman , Ketertiban Umum dan perlinudngan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	12

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
1.05.02.1.01	Pengangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
1.05.02.1.01.0006	Kerjasama Antar lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan Kejahatan	
1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penaganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



PAUNDRA BAYYU AJIE, AP.M.Si
NIP.197609231994121001



INDAH PUSPARANI.S.STP
NIP. 198408122002122001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. LALAN SUHERLAN**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **PAUNDRA BAYYU AJIE, AP.M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

PAUNDRA BAYYU AJIE, AP.M.Si
NIP.197609231994121001

Pihak Pertama,

Drs. LALAN SUHERLAN
NIP. 196902102001121002

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rasio Ketercapaian Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persen	100
	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	480
	Terbentuknya Tim Penilai Angka Kredit dan Sekertariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP yang di Tetapkan dengan SK Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SK Pembentukan TIM Penilai Angka Kredit dan Sekertariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	1
	Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas Melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Dokumen	1
	Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	12
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pelatihan Teknis termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang Mengikuti Pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	Orang	150

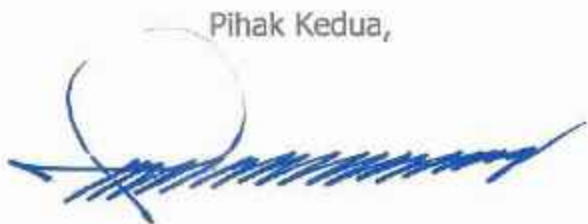
BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

1.05.02.1.01	Pengangan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	
1.05.02.1.01.0011	Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit dan Sekertariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	
1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja Melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia n	

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,



PAUNDRA BAYYU AJIE, AP.M.Si
NIP.197609231994121001

Pihak Pertama,



Drs. LALAN SUHERLAN
NIP. 196902102001121002





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ROHMAWATI, S.Ag, M.Si**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENANGANAN PELANGGARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA epala Seksi Penanganan Pelanggaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP.MM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANGA-UNDANGAN DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP.MM
NIP.19770607199121001


ROHMAWATI, S.Ag.M.Si
NIP. 197306132001122003

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rasio Ketercapaian Penegakan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persen	100
	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	2
	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	12
	Terlaksana Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Laporan	1
	Terlaksananya Pemberkasan hasil Penyelidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyelidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen	1

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
1.05.02.1.02.0005	Penyelidikan terhadap Dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	
1.05.02.1.02.0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegka Peraturan Daerah	

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP.MM
NIP.19770607199121001


ROHMAWATI, S.Aq.M.Si
NIP. 197306132001122003





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRLAN PAUJI, SH.M.AP**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP.MM**

Jabatan : **KEPALA BIDANGAN PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP.MM
NIP.19770607199121001

Pihak Pertama,

IRLAN PAUJI, SH.,M.AP
NIP. 198307242008121002

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Rasio Ketercapaian Penegakan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persen	100
	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	3
	Terlaksananya Pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	8
	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Laporan	2
	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan	1

BELANJA	
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTAPERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ADE SYARIEF HIDAYATULLAH, S.STP.MM
NIP.19770607199121001


IRLAN PAUJI, SH.,M.AP
NIP. 198307242008121002





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD AMRI ALAM, S.STP**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER
PPNS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI
BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSTANTINA, ST.M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PPNS PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI BANTEN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

KUSTANTINA, ST.M.Si
NIP. 197208311998032006

Pihak Pertama,

MUHAMMAD AMRI ALAM, S.STP
NIP. 198903062010101002

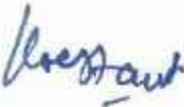
No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persen	100
	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Laporan	3
	Tersedianya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	1

BELANJA KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS (Satuan Polisi Pamong Praja)	
1.05.02.1.03.0006	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



KUSTANTINA, ST.M.Si
NIP. 197208311998032006

MUHAMMAD AMRI ALAM, S.STP
NIP. 198903062010101002





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAYYID WICAKSONO,SH, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **KUSTANTINA, ST.M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PPNS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

KUSTANTINA, ST.M.Si
NIP. 197208311998032006

Pihak Pertama,

SAYYID WICAKSONO,SH,M.Si
NIP. 198306242011011001

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persen	100
	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	1
	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	1
	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	7

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	
1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS	
1.05.02.1.03.0004	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	
1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,



KUSTANTINA, ST.M.Si
NIP. 197208311998032006

Pihak Pertama,



SAYYID WICAKSONO, SH, M.Si
NIP. 198306242011011001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INU SASONGKO, SE.M.Si**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PENYELNGGARAAN PEMETAAN RAWAN
KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. LUTFI MUJAHIDIN.M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. LUTFI MUJAHIDIN, M.Si
NIP. 197108061991011001

Pihak Pertama,

INU SASONGKO, SE.M.Si
NIP. 197503262009021001

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terserlaksananya Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persen	100
	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/ Kota dalam Pencegahan, Penganggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1
	Tersedianya Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala sah dan Legal	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala sah dan Legal	Dokumen	1
	Tersedianya Dokumen Secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia atau Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen Secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia atau Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen	1
	Terlaksananya Bimbingan teknis terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang mengikuti Bimbingan teknis Pencegahan, enanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	50
	Tersedianya Dokumen yang Memuat data Kejadian dan Dampak Kebakaran Serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid	Jumlah Dokumen yang memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran Serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid	Dokumen	1

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Orang	50
	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	Laporan	1
	Tersedianya Dokumen rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang Sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	1
	Tersedianya Dokumen Pemuktahiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	1
	Terlaksananya Kompetensi teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	1
	Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen	1
	Terlaksananya Pembinaan Aparatur pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	1
	Terlaksananya Sosialisasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran melalui Media Sosisa, Wahana Multimedia Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi an Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	1

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang bisa di perbaharui atau Dimuktahirkan Secara Berkala, Berkelanjutan dan Real team yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	Kab/Kota	1
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan evakuasi yang sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	1
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal sesuai Standar teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal sesuai Standar teknis Terkait	Unit	4

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	
1.05.04.1.01.0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
1.05.04.1.01.0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
1.05.04.1.01.0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
1.05.04.1.01.0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	
1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	

1.05.04.1.01.0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
1.05.04.1.01.0016	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analisis Kebakaran	
1.05.04.1.01.0017	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
1.05.04.1.01.0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	
1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	
1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
1.05.04.1.01.0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	
1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
1.05.04.1.01.0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,



Drs. LUTFI MUJAHIDIN, M.Si
NIP. 197108061991011001

Pihak Pertama,



INU SASONGKO, SE.M.Si
NIP. 197503262009021001





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IMAN WAHYUDIN.S.Sos**

Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. LUTFI MUJAHIDIN.M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Drs. LUTFI MUJAHIDIN.M.Si
NIP. 197108061991011001

Pihak Pertama,

IMAN WAHYUDIN.S.Sos
NIP.197609082002121005

No	Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Kegiatan dan Sub Kegiatan)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100
	Terlaksananya pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	1
	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	1

BELANJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
1.05.04.1.02.0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
1.05.04.1.02.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

Serang, 10 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Drs. LUTFI MUJAHIDIN, M.Si
NIP. 197108061991011001



IMAN WAHYUDIN, S.Sos
NIP.197609082002121005

